KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fahri koreksi biaya konsultasi kompleks DPR
Tanggal : Rabu, 01 November 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Fahri Koreksi Biaya Konsultasi Kompleks DPR

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah membantah pernyataan wakil ketua DPR lainnya, Agus Hermanto, yang menyebut pihaknya mengalokasikan anggaran Rp601 miliar untuk biaya konsultasi terkait dengan pembangunan kompleks parlemen.

Menurut Fahri, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk manajemen konstruksi perencanaan penataan kawasan kompleks parlemen. Untuk biaya konsultasi yang dimaksud sebelumnya dianggarkan hanya Rp30 miliar.

"Rp601 miliar itu untuk manajemen konstruksi perencanaan, konsultan itu paling banyak Rp30 miliar," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin.

Rp601 miliar ialah biaya manajemen konstruksi, sedangkan biaya konsultasi dianggarkan hanya sebesar Rp30 miliar.

Fahri menambahkan, dalam penataan kompleks parlemen itu nantinya akan dibuat alun-alun, perpustakaan, dan museum sehingga menjadi kawasan budaya dan ilmu pengetahuan yang bebas dikunjungi masyarakat. "Nanti menjadi kawasan masyarakat, apabila ada tamu yang ke sini, mereka tidak perlu diperiksa karena kawasan publik berbeda dengan ketika masuk Istana Negara harus ada pengamanan," ujarnya.

Dia menilai rencana pembangunan kawasan politik itu memerlukan desain dan biayanya sederhana, begitu pula dengan biaya konsultan yang ada ketentuannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan DPR menganggarkan Rp601 miliar untuk konsultasi perencanaan penataan kawasan parlemen termasuk pembangunan gedung baru yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Sekarang ini anggaran Rp601 miliar untuk konsultan perencanaan, tak hanya perencanaan gedung, tapi juga meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen seperti alun-alun demokrasi, gedung DPD, gedung DPR, dan segala fasilitas yang ada," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (26/10).

Agus mengatakan anggaran itu sudah cukup lama diajukan, tapi pemerintah belum menyetujui. "Kami dahulu mengajukannya untuk pembangunan gedung parlemen saja, sekarang kajiannya untuk seluruh penataan kawasan parlemen," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan pelaksanaan konsultasi perencanaan tersebut baru bisa dilakukan tahun depan karena APBN 2018 baru saja disahkan DPR pada Rabu (25/10).

Menurut dia, apabila anggarannya sudah cair, akan dilaksanakan Kesekjenan DPR dan prosesnya dipastikan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat serta media massa. (Nov/P-5)